

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK CACAT TERSEMBUNYI TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SEKTOR OTOMOTIF DI DKI JAKARTA**

**Hayati**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa konsumen atas cacat tersembunyi suatu barang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dimana John Rawls berpandangan bahwa keadilan harus diformalkan melalui konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial. Keadilan formal adalah juga menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, yang mengedepankan pendekatan kuantitatif. guna merumuskan suatu gagasan secara deduktif untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa posisi konsumen menerima dan menyetujui apa yang diperjanjikan sehingga barang atau hasil produk yang mengandung cacat tersembunyi yang tidak kelihatan mata pun diterima konsumen. Desakan kebutuhan dan minimnya pengetahuan konsumen ini dipergunakan oleh pelaku usaha dalam mencapai tujuannya. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atau pembeli produk cacat tersembunyi sektor otomotif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 19 sampai Pasal 28 mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha atas produk atau tanggung jawab produk. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Saran yang disampaikan adalah agar perlindungan terhadap konsumen atas kepemilikan produk cacat tersembunyi yang dibeli dari pelaku usaha dapat berjalan efektif maka pemerintah harus membentuk sektor-sektor perlindungan konsumen (SPK) yang berada dibawah Badan Perlindungan Konsumen Nasional di tingkat kabupaten dan/atau kecamatan, yang bertugas mengkontrol, memantau, dan menerima pengaduan konsumen atau peredaran produk cacat.

**Kata Kunci** : produk cacat tersembunyi

# **CONSUMER PROTECTION LAWS FOR THE DEFECTIVE PRODUCT HIDDEN PLAYERS TO LIABILITY FOR AUTOMOTIVE BUSINESS SECTOR IN JAKARTA**

**Hayati**

## **Abstract**

This study was conducted to determine the pattern of consumer dispute resolution on hidden defects of goods based on the Law on Consumer Protection and Ministerial Decree No. 350 / MPP / Kep / 12/2001 on the Duties and Powers of Consumer Dispute Settlement Board and legal protection under Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The theory used in this research is the theory of justice in which John Rawls argued that justice should be formalized through the constitution and the law as a basis the implementation of the rights and obligations of individuals in social interaction. Formal Justice is also demanding a minimum common ground for all people.

The method used is a normative juridical research, which emphasizes quantitative approach. in order to formulate an idea deductive to produce a conclusion. Results of this study was formulated that the position of consumers accept and approve what is agreed that goods or products containing defects result covert invisible eyes were acceptable to consumers. Urgency and lack of consumer knowledge is used by the business in achieving its goals. It is in fact contrary to the provisions contained in the draft Civil Code and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The legal protection and the responsibility of businesses towards consumers or buyers of hidden defects in the automotive sector Law No. 8 of 1999 on Article 19 to Article 28 set the accountability of business actors on the product or product liability. The principle responsibility of businesses according to the Consumer Protection Act is the principle of the presumption to always responsible.

Suggestions submitted is for the protection of consumers on the ownership of the products hidden defects purchased from businesses to be effective, the government must establish sectors of consumer protection (SPK) under the National Consumer Protection Board at the district and / or districts, in charge control, monitor, and receive consumer complaints or the circulation of defective products.

**Keywords:** hidden defect products